

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan berperan penting bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan berisikan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan. Untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan, maka perusahaan *go public* diwajibkan untuk mengaudit dan mengungkapkan laporan keuangannya setiap tahun di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut dilakukan agar laporan keuangan perusahaan memiliki karakteristik laporan keuangan yang berkualitas, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami serta memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan. Maka, perusahaan menunjuk auditor eksternal untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan agar penilaian audit dapat disajikan secara bebas dan tidak memihak.

Pengguna laporan keuangan bergantung pada auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berisi pengungkapan yang diperlukan untuk pengguna laporan keuangan. Auditor menerima *fee* yang disebut sebagai biaya audit atas jasa professional auditor. Akan tetapi, auditor harus mampu mempertahankan independensi dan berpegang teguh pada etika dalam berprofesi meskipun auditor menerima biaya audit dari penugasan yang dilakukan.

Menurut Hoitash et al. (2007) biaya audit adalah biaya yang dikeluarkan oleh *auditee* untuk mendapatkan jasa audit profesional mereka kepada klien dalam audit laporan keuangan. Biaya audit adalah biaya yang dibebankan oleh auditor dalam proses audit kepada perusahaan yang diaudit, penentuan biaya audit didasarkan pada kesepakatan antara auditor dan *auditee* berdasarkan waktu yang dibutuhkan, jumlah staf, dan jenis auditnya. Besarnya biaya audit akan dipengaruhi oleh dua kategori yaitu atribut klien dan atribut auditor. Atribut klien yaitu ukuran, kompleksitas, risiko dan profitabilitas dari *auditee*. Sedangkan atribut auditor adalah ukuran KAP, reputasi, pengalaman, spesialisasi industri dan kompetensi KAP (El-Gammal, 2012).

IAPI telah mengeluarkan PP IAPI No. 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, mengacu pada Pasal 5 yang menegaskan kebijakan penentuan biaya audit bahwa besaran biaya audit ditentukan dengan tiga metode, yaitu : (1) besarnya biaya audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan, (2) besarnya biaya audit dihitung tanpa memperhatikan waktu yang dihabiskan untuk mengaudit, dan (3) besarnya biaya audit ditentukan berdasarkan waktu yang digunakan tetapi dengan batasan waktu yang telah disepakati agar tidak mengulur-ulur waktu.

Sejumlah skandal perusahaan di seluruh dunia seperti Enron, Arthur Anderson, Worldcom dan Zona Bebas Port Klang (Malaysia), telah mempengaruhi reputasi profesi akuntansi dan juga pelaporan keuangan (Griffin, Lont, & Sun, 2009). Pada kasus Enron, KAP Arthur Anderson di tahun 2000 menerima *fee double* dengan total fee lebih dari \$50 juta, yaitu berupa *fee* atas

konsultasi sebesar \$27 juta dan *fee* dari jasa audit sebesar \$25 juta. Sebagian pengamat mempertanyakan kewajaran dari jumlah *fee* yang diterima oleh Andersen dari Enron tersebut dan jelas pada kasus ini, Andersen tidak independen dalam mengaudit Enron serta melanggar etika profesi.

Selain itu di Indonesia juga terjadi beberapa skandal akuntansi yang melibatkan KAP skala nasional, yaitu kasus PT. Garuda Indonesia Tbk. Kementerian Keuangan memaparkan tiga kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Adapun, laporan keuangan tersebut diaudit oleh AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik. Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk mendatangi persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci ketiga kelalaian yang dilakukan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Sehingga, AP ini terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit

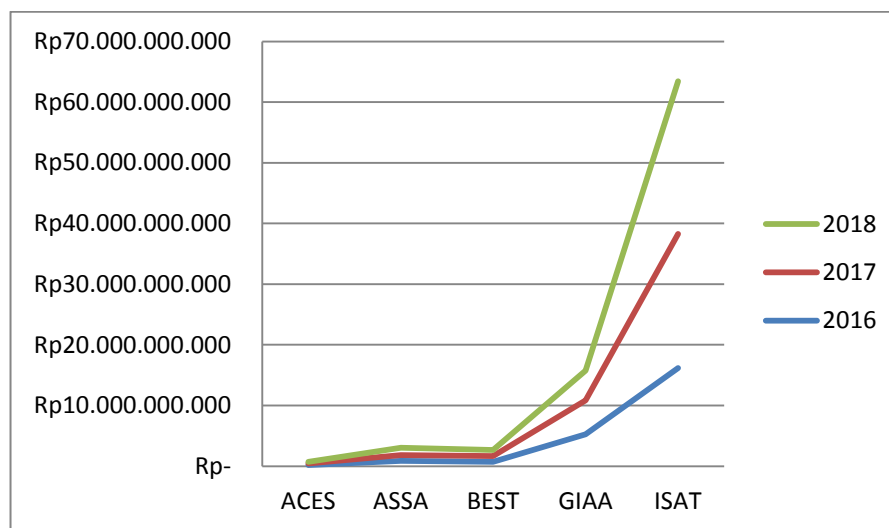
yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500. Terakhir, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. Tak hanya itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat Kasner bernaung pun diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP (CNN Indonesia, 2019).

Disamping itu, terdapat fenomena dimana hanya sebagian kecil dari perusahaan yang terdaftar di BEI mencantumkan besaran biaya audit yang dibayarkannya kepada KAP sebagai penyedia jasa, biaya audit ini terlihat dari besaran biaya audit yang sebenarnya yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan, jika dibandingkan pada perusahaan-perusahaan diluar negeri dimana mereka telah mencantumkan besaran biaya audit yang dibayarkan kepada Akuntan Publik dalam *annual report*, hal ini menimbulkan masalah mengenai transparansi dari besaran biaya audit yang masih dipertanyakan. Padahal transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good corporate governance* yang semestinya diterapkan oleh perusahaan *go public*. Menurut Nugrahani & Sabeni (2013) menyatakan bahwa belum tersedianya data mengenai biaya audit dikarenakan pengungkapan data tentang biaya audit di Indonesia masih berupa *voluntary disclosure*. Sehingga belum banyak perusahaan yang mencantumkan data tersebut dalam laporan keuangan.

Terungkapnya kasus-kasus skandal akuntansi menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan. Masyarakat berpandangan bahwa hal tersebut menunjukkan masih lemahnya mekanisme *good corporate*

governance (GCG) yang diterapkan perusahaan. Selain itu masyarakat juga beranggapan bahwa kualitas laporan keuangan yang diterbitkan masih lemah. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan dari para pengguna laporan keuangan mengenai penerapan mekanisme GCG yang dilakukan perusahaan serta kualitas audit yang dilakukan oleh auditor eksternal.

Berikut ini adalah gambaran biaya audit perusahaan yang diambil dari 5 perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 :



Gambar 1.1 Grafik Biaya Audit 5 Perusahaan Jasa di BEI tahun 2016-2018

Sumber: www.idx.co.id

Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat tren positif atau dengan kata lain terdapat peningkatan secara kontinu pada biaya audit dari tahun ke tahun. Grafik ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi besarnya fee auditor eksternal, salah satu di antaranya yaitu komite audit. Pembentukan komite audit diharapkan mampu meningkatkan keefektifan fungsi pengawasan dalam proses *governance*. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara

wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan manajemen.

Menurut Rustam et al. (2013) keberadaan komite audit akan meningkatkan biaya audit. Komite audit sebagai pengawas independen akan meningkatkan kualitas audit yang tinggi dengan memakai auditor dari KAP besar dan komite audit akan memastikan bahwa proses audit berjalan dengan baik sampai tingkat kualitas yang diinginkan sehingga biaya audit akan semakin tinggi.

Keberhasilan komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tentunya dipengaruhi oleh berbagai keragaman sumber daya anggota komite audit. Keragaman atau variasi tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti jenjang pendidikan, pengalaman kerja, profesionalisme, etnis, dan termasuk juga *gender*. Salah satu isu *corporate governance* yang berkembang beberapa tahun terakhir adalah isu *board diversity* berbasis *gender*. Dalam hal ini, *gender* dapat digambarkan dari sisi keanggotaan wanita di komite audit. Menurut Ittonen et al. (2011) biaya audit eksternal lebih rendah ketika ada wanita di komite audit. Namun ini tidak konsisten dengan temuan Gul et al. (2008) bahwa biaya audit adalah lebih tinggi dengan keanggotaan dewan wanita.

Selain faktor keberadaan wanita di komite audit, terdapat hal lain yang penting yaitu *audit risk* dan *audit effort*. *Audit risk* merupakan risiko kesalahan auditor dalam memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang salah saji secara material (Guy, Alderman, & Winters, 2016).

Audit risk berarti auditor menerima tingkat ketidak pastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Auditor harus menyadari bahwa ada ketidak pastian mengenai kualitas bahan bukti, keefektifan pengendalian internal klien dan ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah di audit (Houston, Peters, & Pratt, 1999). Dalam penelitian Kusharyanti (2013) dapat diketahui bahwa tingkat *audit risk* mempengaruhi besaran biaya audit. Semakin besar *audit risk* maka akan semakin besar pula biaya audit yang akan diterima auditor. Selain itu, besarnya jumlah biaya audit juga dapat dipengaruhi dari usaha atau *effort* yang dilakukan auditor selama melakukan prosedur audit atas laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian Jaggi & Low (2011) dapat diketahui bahwa semakin besar *audit effort* maka akan menghasilkan biaya audit yang tinggi.

Penelitian mengenai biaya audit telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu Aldamen et al. (2016), Apandi (2016), Azizah et al. (2019), Chiu et al. (2018), Hafiza et al. (2017), Jizi & Nehme (2018), Kusano & Sakuma (2019), Nelson & Mohamed-rusdi (2015), Pertiwi (2019), Prawira et al. (2017), Sukaniasih & Tenaya (2016), Troshani (2016), Wisnantiasri (2018), Wulandari & Nurmala (2019), Yen et al. (2018) dan Yulio (2016). Namun penelitian sebelumnya jarang menggunakan keberadaan wanita di komite audit sebagai variabel independen serta *audit risk* dan *audit effort* sebagai variabel mediasi. Selain itu, penelitian biaya audit banyak dilakukan di negara-negara yang menerapkan sistem CG satu dewan, seperti Inggris dan Amerika. Sangat terbatas yang meneliti menggunakan perusahaan *go public* Indonesia dimana Indonesia

adalah negara yang unik dan sistem CG yang berbeda, sekalipun menganut sistem dua dewan yang di anut oleh negara-negara *Continental Europe* (Zaitul & Ilona, 2018). Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengkaji biaya audit pada perusahaan Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji **Pengaruh Keberadaan Wanita di Komite Audit terhadap Biaya Audit : *Audit Risk* dan *Audit Effort* sebagai Variabel Mediasi pada Perusahaan Jasa di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2016-2018.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh keberadaan wanita di komite audit terhadap biaya audit ?
2. Apakah terdapat pengaruh keberadaan wanita di komite audit terhadap *audit risk* ?
3. Apakah terdapat pengaruh keberadaan wanita di komite audit terhadap *audit effort* ?
4. Apakah terdapat pengaruh *audit risk* terhadap biaya audit ?
5. Apakah terdapat pengaruh *audit effort* terhadap biaya audit ?
6. Apakah terdapat pengaruh keberadaan wanita di komite audit terhadap biaya audit dengan *audit risk* sebagai variabel mediasi ?
7. Apakah terdapat pengaruh keberadaan wanita di komite audit terhadap biaya audit dengan *audit effort* sebagai variabel mediasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis mengenai:

1. Pengaruh keberadaan wanita di komite audit terhadap biaya audit.
2. Pengaruh keberadaan wanita di komite audit terhadap *audit risk*.
3. Pengaruh keberadaan wanita di komite audit terhadap *audit effort*.
4. Pengaruh *audit risk* terhadap biaya audit.
5. Pengaruh *audit effort* terhadap biaya audit.
6. Pengaruh keberadaan wanita di komite audit terhadap biaya audit dengan *audit risk* sebagai variabel mediasi.
7. Pengaruh keberadaan wanita di komite audit terhadap biaya audit dengan *audit effort* sebagai variabel mediasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada peneliti dan pihak lain. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian sebelumnya seperti penelitian Aldamen et al. (2016) tentang *Female Audit Committee Members and Their Influence on Audit Fees*. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Pengaruh Keberadaan Wanita di Komite Audit terhadap Biaya Audit dengan *Audit Risk* dan *Audit Effort*

sebagai Variabel Mediasi, yang penelitian ini masih tergolong sedikit di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga akademis untuk menambah referensi dan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa, khususnya mengenai Pengaruh Keberadaan Wanita di Komite Audit terhadap Biaya Audit : *Audit Risk* dan *Audit Effort* sebagai Variabel Mediasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan. Untuk memberikan gambaran umum yang jelas tentang penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, fenomena, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis. Bab ini akan menguraikan tentang landasan teori, pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran yang berkaitan dengan biaya audit, keberadaan wanita di komite audit, *audit risk* dan *audit effort*.

Bab III adalah Metodologi Penelitian. Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian dari proses pengambilan populasi dan sampel, jenis dan

sumber data, definisi operasional variabel, pengukuran variabel dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV adalah Hasil dan Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

Bab V adalah Penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.